



**SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER**  
**Peluang, Tantangan dan Strategi Perguruan Tinggi**  
**Menghadapi MEA 2015**

## **IMPLEMENTASI MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN BERPERSPEKTIF GENDER MELALUI PENDEKATAN SOSIOKULTURAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SLEMAN**

<sup>1</sup>Rosalia Indriyati Saptatiningsih  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UPY  
iin.rosalia@yahoo.com  
<sup>2</sup>Tri Siwi Nugrahani  
Fakultas Ekonomi UPY  
tri.siwunugrahani@yahoo.com  
<sup>3</sup>Sri Rejeki  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UPY  
umi.cici.66@gmail.com

### *Abstract*

*The research's objectives were to try out the poverty alleviation model based on gender perspective through economy socio cultural and environment approach in Sleman District, Yogyakarta Special Region, creating a poverty alleviation formula based on gender perspective as an alternative input poverty alleviation programs, and providing policy input of poverty alleviation model. Participation observation, documentation, and depth interview were used to collect the data. Research subjects were officials in the work unit area of Sleman District Government (Planning Agency and Regional Development, Employment and Social Services, Family Planning Agency and Community Empowerment, Environmental Services), as well as section head of public welfare of Turi District, Donokerto Village Chief, Village Chief, community figures and the target groups of poverty alleviation programs.*

*The result showed that through socio cultural approach, women's groups have awareness of themselves as whole human being and position in the culture, while empowerment through skills training that is adapted to the local potential can increase the motivation to establish productive economic activities. Through environmental awareness, the groups were able to develop food processed diversification made from local basis.*

*It can be concluded that the poverty alleviation model based on gender perspective through economy socio cultural and environment approach can improve the people motivation, especially rural women in efforts to develop their potential to form local productive economic activities in order to form community independence, this model can be used as an alternative poverty alleviation programs.*

**Keywords:** Poverty, Gender, Socio Cultural, Economy, Environment

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multi dimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek sosial, budaya juga ekonomi. Perempuan desa khususnya masih banyak yang tidak berdaya. Rupanya usaha peningkatan potensi perempuan di Indonesia masih harus mendapat perhatian. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan saja, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak kewajiban status dan akses dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai fenomena sosial, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Indriyati & Nugrahani, 2010).

Kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Krisis dimensional seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini ekonomi, politik dan sosial, bencana alam, banjir, dan lain-lain, sehingga membuat harga kebutuhan pangan seperti harga beras dan kebutuhan pokok lainnya naik, juga kesulitan air bersih dan lain-lain membuat perempuanlah yang memikul beban paling berat. Oleh karena itu memperhatikan masalah perempuan sangatlah penting, karena antara kualitas ibu rumah tangga dan kualitas keluarga saling berhubungan. Hal ini dapat dipahami, bahwa jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah, maka akan berpengaruh pada kualitas keluarga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi

reproduksi. Bagaimana caranya melaksanakan peran dengan baik, jika dirinya sendiri sebagai perempuan masih rapuh atau rentan.

Dalam menghadapi globalisasi diperlukan komitmen bersama, untuk bersatu dengan semangat solidaritas dan membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan. Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan masyarakat miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan melalui pendekatan humanistik, pendekatan ekonomi produktif dan penyadaran lingkungan hidup. Pengalaman melaksanakan Pengabdian Masyarakat melalui Hibah PPM IbM tahun 2009 (Indriyati, dkk., 2009) pemberdayaan perempuan melalui partisipasi aktif sasaran, menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Dari hasil penelitian pada tahun pertama (2014) diketahui belum sinerginya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Luaran hasil penelitian pada tahun pertama (2014) berupa rancangan model pengentasan kemiskinan berperspektif gender melalui pendekatan sosiokultural, ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk penelitian tahun ke dua (2015) ini mengujicobakan rancangan model model pengentasan kemiskinan hasil penelitian tahun pertama (2014).

Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dimunculkan adalah "Bagaimana implementasi model pendekatan sosio kultural ekonomi dan lingkungan hidup dapat diterapkan untuk program Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender?"

## KAJIAN LITERATUR DAN PEGEM-BANGAN HIPOTESIS

### a. Gambaran Umum Kemiskinan

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian

pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari UU No 40/2004 tersebut terlihat bahwa upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, juga harus melihat potensi yang dimiliki di wilayah sekitar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apabila sudah mengetahui potensi wilayah tersebut, maka akan mampu mengetahui pula daya saing atau keunggulan dari wilayah tersebut, sehingga masyarakat di sekitar wilayah tersebut akan merasa sejahtera karena masyarakat mampu memiliki penghasilan yang cukup atau tidak dikatakan miskin

Terdapat dua macam kemiskinan, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (*relative and absolute poverty*). Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar kelompok pendapatan, oleh karenanya selalu dinamis. Hakikat kemiskinan ini tidak dilihat dari indikator-indikator ekonomi, namun menyangkut aneka dimensi sosial.

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Mengingat persoalan struktural dan multidimensi tersebut, maka upaya penanggulangan seyogyanya diletakkan dan dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan kan

menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak (Keppi Sukesi, 2009:1). Selanjutnya salah satu rekomendasinya hasil penelitiannya adalah model penanggulangan kemiskinan partisipatif yaitu yang berasal masyarakat terutama perempuan miskin dan tokoh masyarakat adalah alternatif yang perlu diuji coba. Model ini dimulai dari kegiatan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perempuan miskin, perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip adil, partisipatif, dan berorientasi pemecahan masalah, kelembagaan terpadu dan monitoring serta evaluasi periodik dan berkelanjutan

( Keppi Sukesi, 2009 :15).

Dari hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan sebagai subyek, agar perempuan dapat mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhannya, sehingga akan berkembang sesuai potensi. Adanya bencana gunung merapi dapat diduga bahwa jumlah KK miskin di daerah Kabupaten Sleman akan meningkat pasca bencana Gunung merapi, karena bencana Gunung Merapi selain korban jiwa juga kerugian material yang tidak sedikit

( Indriyati & Nugrahani, 2010 ).

#### **b. Pemberdayaan Berperspektif Gender**

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok berdaya, istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Lahir dan berkembangnya konsep *empowerment* memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep *empowerment* itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk *empowerment* akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep *empowerment* tersebut tidak disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau *power*, orang yang tidak berdaya dapat berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan disini berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan. Proses ini pernah dilakukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah PPM IbM tahun 2009, di Parangtritis Bantul, yang hasilnya bahwa dengan metode partisipasi aktif, perempuan Kelompok perempuan pesisir setelah mendapatkan tambahan pelatihan, dan pendampingan pelaksanaan hibah PPM 2009 ini adalah perempuan pesisir menjadi mandiri dalam hal ekonomi dan social, dan dapat ikut mengembangkan lingkungan sosialnya. Dengan meningkatnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya., yang selanjutnya

akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan (Indriyati, dkk, 2009).

Hasil penelitian PSW UGM tahun 2006, merumuskan bahwa pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Selanjutnya dalam salah satu rekomendasi penelitiannya menyebutkan bahwa perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai implementasi Inpres no 9 tahun 2000 (Tim PSW UGM, 2006 : 70).

Dengan penelitian ini yang menerapkan model pendekatan sosio kultural, ekonomi dan lingkungan, melalui pendekatan tersebut diharapkan perempuan miskin mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan pendekatan kultural dapat diketahui faktor-faktor budaya yang mendukung perubahan. Pendekatan ekonomi ini diharapkan perempuan dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha ekonomi produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan pendekatan lingkungan perempuan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungannya melalui kesadaran untuk masa depan generasi penerusnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebagaimana diketahui bahwa penelitian kualitatif banyak disebut sebagai jenis penelitian dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif. Pada intinya jenis penelitian kualitatif dengan serangkaian prosedurnya akan digunakan untuk memperdalam informasi tentang strategi pengentasan kemiskinan.

### a. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian di Dusun Gading Kulon Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

#### b. Teknik Pemilihan Sumber Data

Penelitian kualitatif sebenarnya tidak mempersoalkan sampel, namun mengingat banyak lembaga/organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah yang menangani program pengentasan kemiskinan, maka peneliti hanya mengambil beberapa lembaga saja sebagai unit analisis, yang dirasa dapat mewakili proses pelayanan bagi program pengentasan kemiskinan khususnya yang menggunakan metode pemberdayaan perempuan seperti yang terangkum dibawah ini :

1)SKPD terkait (Bappeda,Nakersos, BKBPM,Dinas Lingkungan Hidup), sebagai informan dari lembaga ini adalah pejabat struktural yang terkait. Informasi dari pejabat ini sangat penting untuk menggali berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan penanganan kemiskinan, serta berbagai kebutuhan data sekunder lainnya, seperti peraturan-peraturan pemerintah daerah, administrasi, finansial/dukungan pendanaan, termasuk mencari informasi tentang integrasi lembaga-lembaga dalam program pengentasan kemiskinan.

2)Pejabat struktural Kecamatan Turi yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dan PLKB informasi ini diperlukan karena sebagai pelaksana langsung program pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

3)Tokoh masyarakat dan kelompok perempuan miskin Dusun Kemiri Gading Kulon, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, informasi dari kelompok ini penting untuk mengetahui kebutuhan riil perempuan dan model pemberdayaan yang tepat.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

1)Data sekunder didapat dengan mengumpulkan dokumen pelbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Dokumen yang diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung antara lain berupa karakteristik / profil lembaga, peraturan –peraturan , sumber dana, dan data lainnya yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Data tersebut dikumpulkan secara acak dengan pedoman pada asas kelayakan, yakni peneliti merasa cukup terhadap data bersangkutan yang dianggap telah

representatif. Data sekunder ini mempunyai peran besar untuk menjadi bahan perbandingan antara fakta yang ditemui dilapangan dan tulisan yang diprogramkan . Keduanya mempengaruhi penulis dalam penafsiran data.

2)Wawancara mendalam (*depth interview*) digunakan untuk memperoleh dan menggali informasi mengenai pengalaman-pengalaman informan dalam menangani persoalan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan berperspektif gender, serta dinamika jaringan kerjasama antar instansi dalam menangani program pengentasan kemiskinan. Dalam wawancara mendalam ini berharap dapat dilakukan dengan pimpinan lembaga yang bersangkutan, sebab asumsinya pimpinan merupakan penentu dari kebijakan atas kegiatan dari program jejaring yang dibangun dengan lembaga lain. Dalam pengumpulan data melalui metode *depth interview* ini menggunakan instrument berupa *interview guide* guna memudahkan dan memberikan petunjuk dalam rangka pengumpulan data.

3)Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung atas segala yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, teknik ini sebagai alat untuk melengkapi teknik lainnya.

#### d. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, (Sugiyono, 2012) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Kabupaten Sleman

Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata, Pemerintah Kabupaten Sleman merencanakan slogan gerakan pembangunan desa terpadu **Sleman Sembada**. Secara harafiah Slogan Sleman Sembada diartikan sebagai kondisi Sehat, Elok, dan Edi, Makmur dan Merata, Bersih dan Berbudaya, Aman dan Adil, Damai dan Dinamis, Agamis. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mencip-

takan Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri.

**Flora Identitas** Kabupaten Sleman adalah Salak Pondoh, yang mempunyai nama latin *Sallaca Edulis Reimw cv Pondoh*. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa tanaman salak Pondoh merupakan tanaman khas atau spesifik Kabupaten Sleman. Sedangkan **Fauna Identitas** Kabupaten Sleman adalah **Burung Punglor** yang memiliki nama latin *Zootheria Citria*. Burung Punglor merupakan burung liar memiliki habitat di kebun Salak Pondoh.

### 1) Deskripsi Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Sleman Tahun 2012 sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 laki-laki dan 556.922 perempuan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini .

### 2) Peta Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Peta kemiskinan merupakan gambaran data jumlah penduduk miskin maupun rentan miskin, pekerjaan pokok KK miskin didalam suatu wilayah tertentu. Idealnya peta kemiskinan dibuat berdasarkan standar yang sama dan telah disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam program pengentasan kemiskinan maupun BPS. Dengan demikian satu sumber data dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Peta kemiskinan dapat dijadikan acuan bagi semua instansi pemerintah maupun swasta yang terlibat untuk program pengentasan kemiskinan. Dengan mengacu peta dan data kemiskinan yang sama akan memberikan kemudahan dalam menentukan sasaran garapan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan terbentuknya tim penanggulangan kemiskinan ( TPK) baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten, sampai ke tingkat yang paling bawah, seharusnya akan mempermudah dalam validasi data kemiskinan tiap wilayah. Peta tersebut juga untuk digunakan sebagai penentuan prioritas sasaran program pengentasan berbasis gender.

Untuk mengetahui peta kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat diketahui melalui data tentang jumlah Kepala Keluarga Miskin di tingkat Kecamatan, serta jumlah Kepala Keluarga miskin di lihat dari jenis kelamin,

dan jumlah keluarga miskin dilihat dari jenis pekerjaannya. Penurunan angka kemiskinan tidak besar yaitu dari 15,85% menjadi 13,89 %. Rendahnya penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengkaji lebih lanjut program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai instansi di Kabupaten Sleman.

Namun demikian dalam kurun waktu untuk lima tahun terakhir ini telah ada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Berdasar 14 Indikator Kesejahteraan Keluarga jumlah KK miskin bukan garis kemiskinan di Kabupaten Sleman ada penurunan berdasar verifikasi dan validasi 2012 yaitu sebesar 15,85% atau 49.471 KK tahun 2013 menjadi 13,89 % atau 45.037 KK , hal tersebut dapat diketahui dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah KK Miskin 2009 - 2013

| Tahun | KK Miskin | %     |
|-------|-----------|-------|
| 2009  | 65.157    | 22,17 |
| 2010  | 57.979    | 19,72 |
| 2011  | 50.953    | 16,57 |
| 2012  | 49.471    | 15,85 |
| 2013  | 45.037    | 13,89 |

Sumber: TKPKD SLEMAN

Sedangkan berdasar pada data BPS % garis kemiskinan masyarakat Sleman th 2012 yang berada pada garis kemiskinan ada **10,44%** sedangkan % penduduk miskin DIY 2012 sebesar **15,88%** dan Nasional **11,66%**

Tabel 2 Persentase Kemiskinan

| Tahun | % Nasional | % Miskin DIY | % Miskin Sleman |
|-------|------------|--------------|-----------------|
| 2009  | 14,15      | 17,23        | 11,45           |
| 2010  | 13,33      | 16,83        | 10,70           |
| 2011  | 12,49      | 16,08        | 10,61           |
| 2012  | 11,66      | 15,88        | 10,44           |

Sumber: BPS SLEMAN 2013

### 3) Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman

Kunci keberhasilan pembangunan khususnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat adalah

a) Ketersediaan data basis terpadu yang digunakan untuk sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat dipakai oleh semua stakeholder baik itu pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

b) Dengan spirit seperti itulah maka pada pendataan 2013 ini digunakan dua unit sekaligus, yaitu unit rumah tangga (RT) dan unit keluarga serta indikator yang digunakan dalam pengolahan disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat (PPLS 2011) walaupun tetap berbasis SIMDUK.

c) Penanganan masalah kemiskinan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan komprehensif dengan satu data untuk semua.

### 4) Prinsip Program Penanganan Kemiskinan ( PRONANGKIS)

1. Pemberdayaan
2. Sinergi (kesinambungan)
3. Keberlanjutan
4. Partisipasi
5. Transparan & akuntabel
6. Penguatan kearifan lokal

### 5) Visi, Misi Kabupaten Sleman Dalam Penanggulangan Kemiskinan

#### a. Visi :

Menjadi kabupaten yang berhasil mengurangi jumlah keluarga miskin dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan lokal.

#### b. Misi

a) Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang pro-job, pro-poor dan pro-growth.

b) Mendorong dan meningkatkan partisipasi semua pelaku penanggulangan kemiskinan.

c) Meningkatkan sinergi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

d) Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi keluarga sangat miskin.

e) Mendorong peran aktif warga miskin untuk bangkit agar tidak miskin.

### 6) Tujuan

a) Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sehingga menjadi tidak miskin

b) Meningkatkan kualitas perlindungan dan layanan bagi keluarga miskin

c) Pemutusan rantai generasi miskin

### 7) Strategi

a) Meningkatkan kualitas kinerja pelaku penanggulangan kemiskinan

b) Membangun sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat

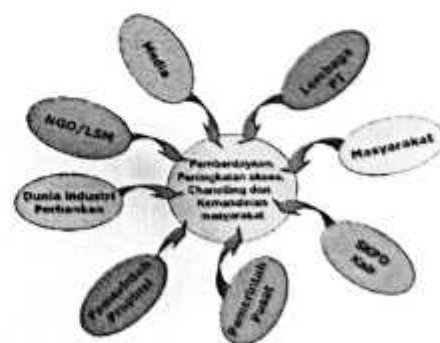
### 8) Kebijakan

a) Menguatkan koordinasi antar OPD

b) Membangun jejaring kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat

c) Meningkatkan kapabilitas aparat pemerintah pada semua tingkatan

d) Mengembangkan nilai asah asih dan asuh pada semua pelaku penanggulangan kemiskinan.



Gambar.1. Pemberdayaan , Peningkatan Akses, Chanelling, dan Kemandirian Masyarakat

### 9) Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman

a. Semua SKPD/CSR/PT harus mengacu pada Data SIM Kemiskinan untuk sasaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan.

b. Dukungan SKPD dan Camat untuk mengfungsikan peran TPK Kec, Desa dan Dusun dalam pronangkis.

c. Fasilitasi operasional untuk TPK Desa dan Dusun didukung APBD Kab melalui transfer bantuan ke pemerintah desa.

d. Untuk mendorong TPK Kec, Desa untuk selalu bersinergi dengan pelaku-2 dunia usaha dan perguruan tinggi sebagai kemitraan dalam pronangkis.

e. Semua SKPD dan TPK secara berjenjang menyampaikan laporan secara periodik bulan Mei dan November ke Sekretariat TKPKD Kab Sleman ( Bidang PM Badan KBPMPP), untuk SKPD menggunakan Formulir 1, II dan TPK Kec, Desa, Dukuh menggunakan Format Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Revitalisasi.

f. Mendorong keterpaduan program baik dari Pusat, propinsi dan Kab dalam ketepatan sasaran.

g. Data PPLS Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh TNP2K tahun 2012 ini akan dikoneksikan ke SIM Kemiskinan dan tahun 2013 Sleman melakukan Validasi Data PPLS dan SIM untuk dijadikan BDT dengan 2 output ( SIM berdasar NIK untuk Sleman dan RTS untuk TNP2K)

h. Melakukan reward bagi TPK Tingkat Kec, Desa, Dusun yang kinerjanya baik dengan penyerahan TPK Award.

Meskipun konsep penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dipandang sudah bagus , dilihat dari sumber data kemiskinan yang harus dari satu sumber data yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tidak sinerginya antar SKPD. Hal tersebut tampak dari masih ada program yang tumpang tindih, satu sasaran program pengentasan kemiskinan mendapatkan berbagai bantuan program dari beberapa SKPD, tetapi ada masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan . Oleh karena itu perlu kiranya sinergitas program dapat dilakukan untuk efisiensi kegiatan dan pemerataan sasaran program.

Dari berbagai program yang dilakukan melalui SKPD tampak bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sebagian besar adalah karitatif, belum semuanya merupakan program pemberdayaan.

Karena masyarakat sasaran langsung diberikan modal , yang tampaknya kurang dipersiapkan pengembangan usaha tersebut . Selain itu dari pengamatan program tersebut juga tidak bersifat partisipatif, dan kurangnya pendampingan kelompok sasaran. Meskipun dalam **Prinsip Program Penanganan Kemiskinan ( PRONANGKIS) yang sudah dicanangkan Pemda Sleman adalah 1) Pemberdayaan,2) Sinergi (kesinambungan),3) Keberlanjutan ,4) Partisipasi,5) Transparan & akuntabel ,6) Penguatan kearifan lokal**, namun dalam pelaksanaannya enam prinsip tersebut belum berjalan optimal.

Dalam program pengentasan kemiskinan koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program baru sebatas pendampingan dan monitoring program kegiatan, melalui kerja sama dengan TKSK Kecamatan dan kader di dusun.

### **B.Uji Coba Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui**

Pada penelitian tahun pertama ( 2014) ditemukan rancangan model sebagai gambar dibawah ini



Dalam implementasi model tersebut mengalami perubahan, hal ini karena menyesuaikan dengan kondisi dilapangan. Peneliti dalam menentukan lokasi untuk ujicoba model, melakukan analisis dari hasil penelitian tahun I, bahwa pada tahun I dari 3 kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Cangkringan, Ngemplak dan Kecamatan Turi, Untuk Kecamatan Cangkringan dari hasil observasi dan wawancara dengan Bappeda Sleman , setelah adanya erupsi Merapi tahun 2010



banyak program-program pemberdayaan masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi dari berbagai instansi baik swasta, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, maupun pemda sleman serta berbagai LSM yang sangat peduli dalam program pemberdayaan. Selain itu dampak erupsi juga memberikan penghasilan yang cukup tinggi hingga saat ini, yaitu dari pasir dan batu yang dikeluarkan dari gunung Merapi membawa rejeki yang tidak sedikit, sehingga saat ini kehidupan masyarakat di Kecamatan Cangkringan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dalam pelaksanaan penelitian tahun ke dua ini menentukan lokasi di Kecamatan Turi, tepatnya di desa Donokerto.

Dalam upaya mengimplementasikan Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pendekatan Sosiokultural, ekonomi dan Lingkungan Hidup, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

### **1. Menentukan Sasaran Program**

Dalam menentukan sasaran program, dilakukan melalui pendekatan aparat desa yaitu Kepala Desa, dan Kepala Bagian Kesra, karena dipandang yang paling mengetahui kondisi nyata masyarakatnya. Dalam menentukan sasaran program ini peneliti memberikan kriteria subyek sasaran uji coba model, yaitu masyakat miskin khususnya perempuan, dan masih usia produktif. Dari hasil koordinasi di tentukan di dusun Kemiri Gading Kulon Donokerto. Agar pelaksanaan program tidak salah sasaran selanjutnya menemui Kepala Dusun, tokoh masyarakat, letua RW dan Ketua RT . Menentukan sasaran program bagi KK perempuan miskin yang masih produktif

Dalam pengentasan kemiskinan perlu memberikan prioritas bagi KK yang masih produktif. Hal ini penting karena jika KK miskin produktif tetapi tidak diberdayakan , akan memberikan dampak negatif , seperti akan menimbulkan meningkatnya pengangguran yang akhirnya berdampak pada bertambahnya permasalahan sosial. Faktor sosial budaya yang ada di dusun tersebut masih terasa kental dapat dilihat dari masyarakatnya yang masih

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti budaya sambatan/gotong royong, rewang, atau membantu kelurga yang mempunyai hajad dan lain sebagainya, maka faktor ini merupakan modal sosial dalam pengembangan potensi lokal.

Setelah menentukan subyek sasaran ujicoba dari penelitian ini adalah ibu-ibu muda yang belum mempunyai pekerjaan dan mempunyai waktu luang, yang diawali dengan dilakukan sosialisasi agar kelompok masyarakat tidak salah persepsi adanya kegiatan.

### **2. Menggali Permasalahan Kelompok sasaran dan Penguatan Kelompok**

Dalam tahap ke dua menggali permasalahan kelompok sangat penting, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan budaya, jumlah kelompok sasaran adalah 13 orang perempuan. Untuk mengetahui program yang tepat untuk kelompok sasaran, perlu dilakukan upaya menggali permasalahan kelompok sasaran. Proses menggali permasalahan idealnya mengajak peran aktif kelompok ,agar kelompok sasaran mengetahui akar permasalahan yang di hadapi dengan sebenarnya. Karena dengan penyadaran akan permasalahan yang dihadapi , seseorang akan mengerti bahwa perlu melakukan perubahan agar mencapai kesejahteraan.

Kelompok perempuan yang menjadi subyek penelitian diajak untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan penyadaran gender kelompok dapat merasakan pentingnya perempuan untuk bangkit meningkatkan kualitas hidupnya. Hasil dari penyadaran disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya penghasilan, karena sebagian dari anggota kelompok adalah buruh tani, dan tidak bekerja. Mayoritas warga hanya seorang buruh tani salak dan sebagian besar kepemilikan perkebunan salak yang ada di desa bukan milik warga setempat, tetapi milik warga desa dari luar desa. Oleh karena dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga dapat digolongkan sebagai masyarakat menengah kebawah, sehingga masyarakat juga mempunyai harapan seperti punya keterampilan usaha produktif. Dalam pertemuan tahapan ini dirumuskan sebuah permasalahan yang

timbul dimasyarakat seperti banyaknya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai aktivitas ekonomi produktif, karena belum mempunyai keterampilan. Agar kelompok perempuan miskin dapat termotivasi dan mau mengembangkan diri, dibutuhkan tokoh kunci untuk menjadi motivator. Dalam kelompok ini tokoh yang menjadi motivator adalah seorang guru SD, dan Seorang guru TK. Diharapkan dengan adanya tokoh tersebut dapat membangkitkan semangat untuk maju. Setelah mengetahui menggali permasalahan, guna mengutkan ide dan semangat peserta , perlu ada penguatan kelompok. Dalam proses ini kelompok diminta untuk membentuk pengurus agar ada komunikasi dan kelompok dapat berjalan dengan baik.

### **3. Menggali kebutuhan kelompok sasaran**

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka langkah selanjutnya adalah menggali kebutuhan khususnya kebutuhan perempuan miskin. Kebutuhan perempuan bukan hanya kebutuhan praktis semata, tetapi juga kebutuhan strategis. Proses ini dapat dilakukan melalui program penyadaran gender. Selain itu juga perlu dikaji sejauh mana program-program yang pernah dilakukan oleh berbagai instansi telah melibatkan perempuan, dan apakah program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Dalam tahapan ini kelompok diminta untuk berdiskusi untuk menggali kebutuhan perempuan. Dari hasil diskusi disimpulkan bahwa kebutuhan kelompok adalah ingin dapat mandiri, mendapatkan penghasilan sehingga dapat eksis dalam keluarga dan dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut kelompok ini memerlukan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisi lokal dan yang hanya menggunakan peralatan sederhana.

### **4. Menggali Potensi SDM dan Potensi Alam**

Program pemberdayaan selayaknya juga memperhatikan potensi alam dari lingkungan sasaran program. Potensi alam yang ada pedesaan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Misalnya saja potensi hasil bumi ketela, salak, pisang dan lain-lain , dapat dikembangkan

menjadi olahan makanan yang dapat meningkatkan nilai hasil tersebut. Sedangkan potensi manusia khususnya perempuan perlu digali karena dengan mengetahui potensi perempuan, maka perempuan akan menyadari bahwa dirinya bukan manusia yang lemah tetapi sebagai manusia yang punya kemampuan yang dapat dikembangkan.

Dalam tahapan ini potensi perempuan yang akan dikembangkan adalah mengolah pangan berbasis lokal atau olahan lokal. Potensi alam yang ada didesa sasaran adalah salak, pisang, dan singkong. Pada saat musim salak , harga salak sangat murah, dan salak yang kecil-kecil nilai jualnya sangat rendah. Secara ekonomis bahan tersebut mempunyai nilai jual yang sangat rendah seperti salak dipasaran hanya Rp 3.000,-/kg, dan untuk salak yang kecil-kecil hanya Rp 1000,-/kg . dan sebagian besar lahan sawa tanah rawah disekitar dusun ditanami salak, dan pohon ketela /singkong. Warga bukan tidak mau membuka usaha akan tetapi belum ada keterampilan untuk membuat uasaha sendiri dan kebanyakan hasil dari menggali potensi adalah: untuk potensi SDM adalah : waktu yang luang , minat/ kemauan untuk berkembang, dan potensi alam salak, singkong, dan pisang uter, pegagan, serta pepaya.

### **5. Pelatihan dan Penyuluhan**

Setelah mengetahui permasalahan, kebutuhan dan potensi kelompok sasaran langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan sesuai harapan kelompok. Pada kelompok Ngudi Rejeki tahapan pelatihan dimulai dari praktik ketrampilan pengolahan makanan berbasis lokal, baru kemudian pelatihan manajemen. penyuluhan untuk penyadaran gender, pentingnya pelestarian lingkungan hidup adapun tahapan yang dilakukan adalah : .

#### **a. Pengembangan keterampilan berbasis lokal**

Untuk menentukan program pelatihan yang tepat sesuai harapan dan potensi kelompok, maka yang menentukan jenis keterampilan apa yang akan dilatihkan, kelompok diminta untuk berdiskusi untuk mencari prioritas pelatihan yang sesuai dengan potensi alam. Dari hasil diskusi disepakai oleh kelompok keterampilan

yang diinginkan adalah pelatihan seperti pembuatan manisan salak, donat salak, dodol salak, dan keripik daun singkong.. Pilihan tersebut menjadi prioritas kelompok karena jenis olahan dodol salak, manisan salak, donat salak, brownies salak, serta keripik daun singkong belum banyak dijual dipasaran.

Potensi lokal salak dan daun singkong inilah yang di kembangkan agar mempunyai nilai lebih dari potensi lokal. Selain pelatihan pengolahan makanan masyarakat juga membutuhkan pelatihan menejemen produksi dan pemasaran. Melalui pendekatan sosio kultural bahwa masyarakat desa yang masih memiliki budaya gotong royong, dan merasa dihargai jika diminta untuk ikut mengambil keputusan.

Strategi dalam pelatihan ini mengajak kelompok untuk berpartisipasi dalam penyediaan bahan pelatihan. Bentuk partisipasi tersebut adalah kelompok menyediakan bahan dasar yaitu salak, daun singkong.

Melalui pendekatan sosio budaya hasilnya lebih efektif, hal ini dapat terlihat bahwa sejak sosialisasi sampai dengan pelatihan terakhir partisipasi anggota sangat tinggi, dan tingkat solidaritas juga baik. Terlebih dalam kelompok ini ada tokoh masyarakat yang mau terlibat sebagai motivator. Dalam setiap kali pelatihan mengolah makanan, kelompok diberikan tugas praktik mandiri, dan hasil praktik diperlihatkan pada pertemuan berikutnya. Dengan metode tersebut ternyata dirasakan manfaatnya sangat bagus, karena kelompok merasa didampingi dalam berproses, dan merasa sangat dihargai posisinya.

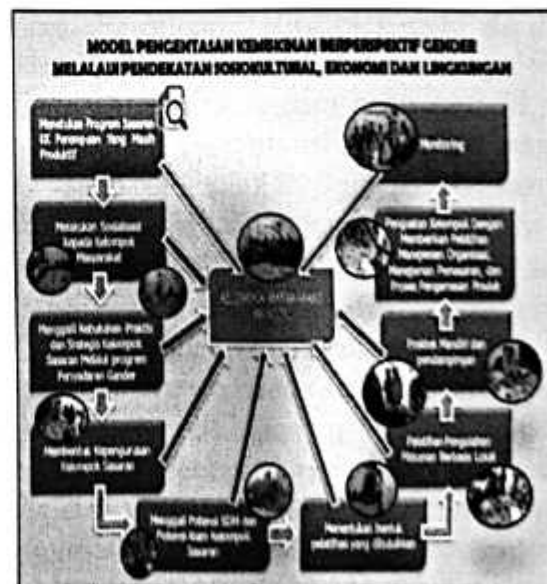
Melalui pelatihan pengolahan pangan lokal, menunjukkan kesadaran kelompok arti pentingnya perawatan dan pemanfaatan lingkungan. Dengan metode tersebut mengajak masyarakat untuk menyadari arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

### b. Penguatan kelompok dan Pelatihan manajemen

Untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan kelompok perempuan , maka perlu diberikan strategi dalam penguatan kelompok. Strategi yang dilakukan adalah melibatkan tokoh perempuan desa. Yang

dapat menjadi motivator kelompok. Dan untuk menunjang program pengembangan usaha ekonomi produktif yang telah dilatihkan maka perlu diberi bekal pelatihan manajemen. Pelatihan manajemen diberikan secara sederhana menyesuaikan kondisi kelompok. Pelatihan yang telah diberikan adalah manajemen organisasi, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan proses pengemasan produk. Melalui pelatihan manajemen organisasi, kelompok dapat menentukan kepengurusan, menentukan waktu produksi, dan menentukan uang modal usaha melalui penarikan setiap bulannya. Sedangkan manajemen produksi diberikan diharapkan kelompok dapat menghitung biaya produksi, dan dapat menentukan harga jual produk yang dihasilkan, sehingga dapat menghitung keuntungan. Dalam pelatihan manajemen pemasaran, diharapkan kelompok mampu menjaring mitra untuk memasrkan produknya, dan untuk menunjang pemasaran kelompok diberikan pelatihan pengemasan, agar hasil olahan makanan tersebut dapat tampil menarik, sehingga laku dipasaran.

Jadi jika dibuat bagan maka alur model penguatan kemiskinan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini



Dari diagram diatas tampak bahwa setiap langkah kegiatan harus bermuara pada kemandirian masyarakat., untuk membawa masyarakat /kelompok mau berpartisipasi dalam setiap langkah, sehingga mengetahui masalah yang dihadapi dan sekaligus diajak untuk mencari solusi yang tepat . Dengan

demikian masyarakat / kelompok khususnya perempuan mampu untuk ambil bagian dalam pengembangan masyarakat.

### C. Hasil Implementasi Model Pemberdayaan Berperspektif Gender

Pelaksanaan ujicoba model dilakukan di Dusun Kemiri Gading Kulon, Desa Donokerto Turi Sleman. Penentuan lokasi ini didasarkan atas koordinasi dengan aparat desa Donokerto. Masyarakat dusun tersebut sebagian besar sebagai petani dan buruh tani, lahan perkebunan salak sebagian besar milik orang luar desa. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara :

1) Masyarakat miskin memang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah namaun bantuan kadang tidak merata, dan sifatnya karitatif. Dari kelompok yang pernah mendapatkan bantuan, mengatakan bahwa bantuan berbentuk uang BLSM, dan beras (Raskin), dan Jamkesmas.

2) Dari 13 anggota kelompok yang menjadi subyek penelitian mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam rangka implemtasi model ini 11 orang menyatakan belum pernah, 2 orang menyatakan pernah mendapatkan pelatihan membuat bakso. Tetapi setelah pelatihan kelompok bubar dan tidak ada kelanjutan.

3) Implementasi Model pemberdayaan ini dari 13 responden mengatakan sangat sesuai dengan keinginan dan kemampuan kelompok sasaran. Karena anggota kelompok diajak untuk mengetahui permasalahannya dan diajak untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

4) Perbedaan model program pengentasan kemiskinan pelatihan yang diberikan dengan model-model yang pernah diterima kelompok adalah , kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah/ LSM yang memberikan. Ada pendapat bahwa pelatihan yang sebelumnya hanya membuat dan ditinggal pergi tanpa ada pendampingan, sehingga kelompok merasakan perbedaan yang nyata, karena dirasakan oleh kelompok bahwa pelatihan model ini sangat bagus dan prospek kedepan lebih meyakinkan.

5) Model pelatihan yang langsung praktik ternyata m,embawa kelompok bersemangat, apalagi kelompok diajak untuk mengatur waktunya sendiri sesuai dengan waktu yang

dimiliki. Sehingga pelatihan dan pemberdayaan akan dirasakan banyak manfaatnya. Dari hasil pendampingan selama ini kelompok berkeinginan untuk mengembangkan. Oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah ataupun pihak lain yang terkait.

6) Langkah yang tidak kalah penting adalah pendampingan dan motivasi. Agar kelompok tidak bubar dan tetap termotivasi untuk Rencana bisa berjalan, berkembang dan maju dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat .

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Melalui pendekatan sosiokultural kelompok sasaran merasa lebih kuat dan bersemangat, karena masyarakat desa merasa bersaudara, senang bergotong royong. Metode partisipasi yang diterapkan mampu merangsang kelompok sasaran untuk aktif mengambil keputusan dan berani mencari akar masalah yang dihadapi, serta mampu menggali potensinya, sehingga mampu mencari solusi dari permasalahannya. Pendekatan ekonomi merupakan realitas sosial yang sangat diharapkan masyarakat miskin. Pemberian praktik keterampilan yang menyesuaikan potensi lokal dapat mengembangkan usaha bersama ekonomi produktif kelompok perempuan, yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Pemahaman pentingnya memelihara lingkungan akan menunjang kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Implementasi Model pengentasan kemiskinan berperspektif gender melalui pendekatan sosiokultural ekonomi dan lingkungan dapat sesuai dengan Visi Pemda Sleman dalam penanggulangan Kemiskinan yaitu " Menjadi kabupaten yang berhasil mengurangi jumlah keluarga miskin dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan lokal."

### b. Saran

Untuk mempercepat penanganan kemiskinan hendaknya ada sinergitas program antar SKPD, bukan hanya pada data sasaran, tetapi pada program dan aktivitas kegitannya, model partisipasi perlu selalu dikembangkan agar masyarakat miskin lebih dapat tergalih potensinya dalam mengembangkan

kemandiriannya, serta perlu ada pendampingan secara periodik agar tercapai pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

## REFERENSI

Badan Pemberdayaan Perempuan DIY, 2003 *Laporan Tim Pembangunan Berperspektif Gender*, Yogyakarta

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2013, *Panduan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2012, *Kajian Dana Bergulir Sebagai Bagian Upaya Penanggulangan Kemiskinan.*, Sleman

Bappenas, 2005, Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2013, *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2012/2013*, BPS Kabupaten Sleman.

BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2009, *Penduduk Kabupaten Sleman Hasil Registrasi Penduduk Pertengahan tahun 2009*, BPS Kabupaten Sleman

Indriyati, Nugahani, Gunawan, Bahrum, dan Purwanti, 2009, *Laporan Ibm Kelompok Perempuan Usaha Pengolahan Makanan Hasil Laut di Pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul* (Hibah Ibm Pengabdian Dikti)

Indriyati, dan Nugahani, 2010, *Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman )* (Hibah Penelitian Studi Kajian Wanita)

Keppi Sukesi, 2009, *Perempuan dan Kemiskinan Profil dan Upaya Pengentasan*, Makalah Seminar Gender dan Keadilan Sosial, Pusat Studi Kependudukan UGM kerjasama DP2M Dirjen Dikti .

Sugiyono, 2012, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Tim Peneliti PSW UGM, *Profil Gender Development Index ( GDI) Dan Gender Empowerment Measure ( GEM) Kabupaten Sleman*, PSW UGM Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sleman

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## 7.PERNYATAAN / PENGHARGAAN

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang Terhormat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat SIMLITABMAS yang telah mengabulkan usulan penelitian ini dengan memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing untuk pelaksanaan tahun ke dua 2015.